

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 & Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah diterbitkan karena timbulnya kesenjangan antar daerah, salah satunya dalam kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan Daerah dapat dijadikan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga daerah. Langkah implementasi Otonomi Daerah Pemerintah Daerah diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan pemerintahan dengan baik (*good corporate governance*), juga Pemerintah Daerah diharapkan mampu bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan. Dalam sektor keuangan Pemerintah Daerah diharapkan mampu membuktikan kualitasnya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan dapat memberikan biaya serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tetapi hal tersebut masih saja menjadi ekspektasi belaka, dikarenakan masih banyak daerah yang belum mampu menghidupi daerah otonomnya, hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya daerah yang bergantung kepada pemberian dana dari pemerintah pusat dalam menjalankan daerah otonomnya. Sehingga dengan fenomena yang seperti itu, maka yang akan menjadi sorotan publik yaitu kinerja keuangan daerah yang dibuat oleh aparatur pemerintah sebagai orang yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah, baik dana yang bersumber dari masyarakat daerahnya sendiri maupun dari pemerintah pusat. Kinerja keuangan daerah itu sendiri merupakan kondisi yang menggambarkan suatu hasil yang di capai dengan penggunaan anggaran daerah pada periode tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah yaitu hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan terlaksananya hak dan kewajiban tersebut. Salah satu bentuk dari pencapaian Pemerintah Daerah dalam sektor keuangan adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Abdul Halim (2016:24), “Kinerja Keuangan Daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.”

Windhu Putra (dalam Ririn Trisdayanti, 2021: 2) menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dinilai dengan analisis rasio keuangan pada APBD, dimana salah satu rasio yang dapat digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan, pembangunan secara mandiri kepada masyarakat melalui pemungutan pajak serta retribusi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kemampuan daerah dapat berupa pola instruktif (peranan Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian daerah), pola konsultatif (peranan Pemerintah Pusat lebih pada pemberian konsultasi), pola partisipatif (peranan Pemerintah Pusat beralih pada partisipasi) atau pola delegatif (peran Pemerintah Pusat sudah tidak ada lagi) pada pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0 – 25	Rendah Sekali	Instruktif
25 – 50	Rendah	Konsultatif
50 – 75	Sedang	Partisipatif
75 - 100	Tinggi	Delegatif

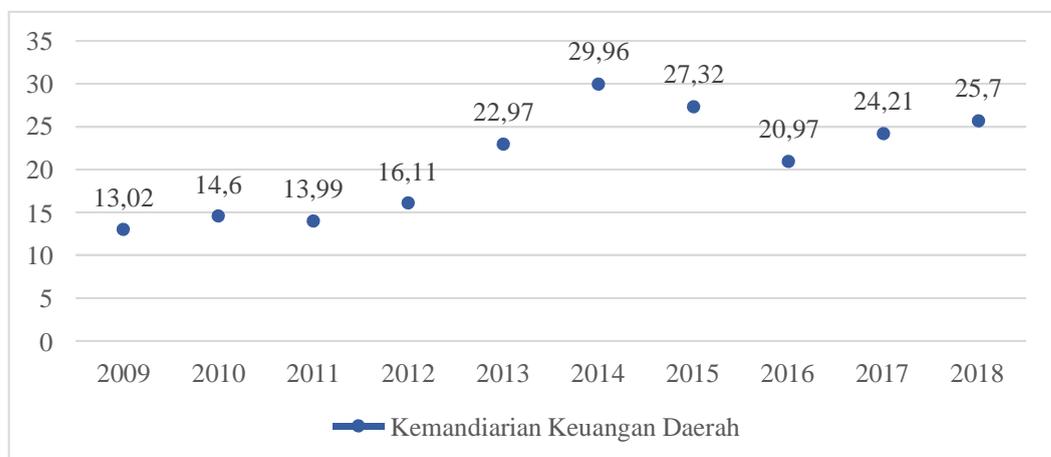
Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Oki (2019)

Adapun keterangan mengenai pola hubungan Kemandirian Keuangan Daerah antara lain:

1. Pola hubungan Instruktif yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada Kemandirian Pemerintah Daerah. Daerah tidak mampu melaksanakan Otonomi Daerah.
2. Pola hubungan Konsultatif yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi.

3. Pola hubungan Partisipatif yaitu peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi Pemerintah Pusat.
4. Pola hubungan Delegatif yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang diukur menggunakan Rasio Kemandirian, dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, diolah (2022)

Gambar 1.1 Rasio Kemandirian pada Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2018 (%)

Berdasarkan gambar 1.1, pada tahun 2009-2018, di Kota Tasikmalaya tidak ada yang memiliki rasio kemandirian dengan kategori tinggi (75-100%) dan pola delegatif serta sedang (50%-75%) dan memiliki pola partisipatif, Kota Tasikmalaya rata-rata memiliki rasio kemandirian dengan kategori rendah sekali (0%- 25%) dengan pola instruktif, juga hanya tahun 2014, 2015 dan 2018 saja yang memiliki kategori rendah (25%-50%) dengan pola konsultatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

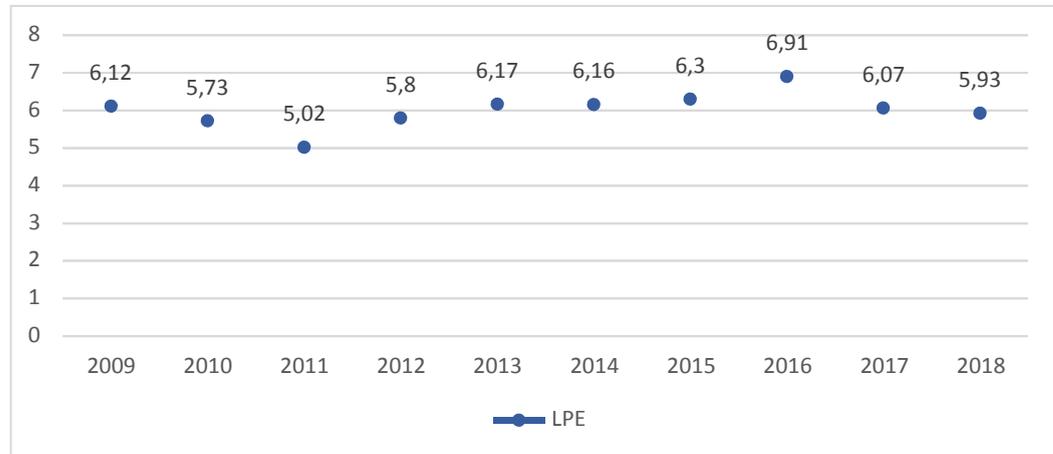
Kemampuan keuangan Kota Tasikmalaya masih sangat rendah dan pola hubungannya instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.

Adapun fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan perekonomian masih mempunyai kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya hambatan antara lain: adanya pasar yang kurang representatif, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membayar retribusi dan kondisi perekonomian masyarakat pembayar yang belum stabil.

Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Tasikmalaya.

Pertumbuhan Ekonomi mencerminkan jika pada suatu periode ekonomi mengalami peningkatan maka dapat disebut positif, namun apabila mengalami penurunan maka disebut negative. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nina, Fitri, (2017) menyatakan bahwa secara simultan dan parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Daerah.. Menurut (Neni, Hamzah, 2020: 30) “Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan daerah yang harus dipacu pertumbuhannya. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan

mampu memberikan kinerja yang baik”. Berikut Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2018 disajikan pada gambar 1.2 berikut ini.



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, diolah (2022)

Gambar 1.2 LPE Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2018 (%)

Kondisi Pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2017-2018.

Selama ini manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan karena anggaran daerah, khususnya belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya tidak dilakukan secara hati-hati sehingga kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Hal ini disebabkan kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah dan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang dapat memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Menurut Asnidar, Hardi Novia (2019) Belanja Modal yang positif yaitu Belanja Modal yang dipengaruhi oleh banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun, semakin banyak pembangunan melalui ditambahkan juga perbaikan infrastruktur maka diharapkan akan mempengaruhi proses peningkatan kinerja keuangan daerah, juga diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dikarenakan hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan masyarakat dalam menjalankan produktivitasnya. Pada tabel 1.2 dapat dilihat data belanja modal Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2009-2018

Tabel 1.2 Perkembangan Belanja Modal (Ribu Rupiah) Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2018

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Perkembangan	
		Rupiah	Persentase (%)
2009	105.871.452,93	-	-
2010	124.138.673,10	18.267.220,17	17,2%
2011	104.450.591,14	-19.688.081,96	-15,9%
2012	126.489.730,29	22.039.139,15	21,1%
2013	261.383.222,35	134.893.492,06	106,6%
2014	276.775.401,44	15.392.179,09	5,9%
2015	319.080.079,45	42.304.678,01	15,3%
2016	387.625.598,91	68.545.519,46	21,5%
2017	425.367.687,73	37.742.088,82	9,7%
2018	374.596.059,06	-50.771.628,67	-11,9%

Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya (Data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa Belanja Modal Kota Tasikmalaya mengalami penurunan cukup besar dengan dengan total -15,9% pada tahun 2011 dikarenakan adanya penurunan penerimaan daerah Kota Tasikmalaya, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2013 hingga 2017.

Pengeluaran pemerintah untuk investasi merupakan bagian terpenting pula dalam menentukan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat dengan cepat atau tidak. Pengeluaran investasi tersebut diperuntukan untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik seperti infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga semakin besar pengeluaran investasi daerah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat menandakan kemampuan daerah tersebut dalam mengatasi kemandirian keuangan di daerah itu. Seperti dalam penelitian Andardani (2019) yang menunjukkan bahwa Investasi Daerah yang diukur dari rasio realisasi belanja modal terhadap PDRB nominal provinsi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan Pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan hal baru yang masih belum banyak diteliti, adalah penting untuk mengkaji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya, sehingga penulis tertarik untuk memilih judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya Periode 2009-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan investasi daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kota Tasikmalaya periode 2009-2018?
2. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan investasi daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kota Tasikmalaya periode 2009-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan investasi daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kota Tasikmalaya periode 2009-2018?
2. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan investasi daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kota Tasikmalaya periode 2009-2018?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pembaca, dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya periode 2009-2018, serta bagi pihak lain yang berkepentingan dapat memanfaatkan penelitian ini untuk referensi penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan, masukan, atau evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi institusi pendidikan yaitu agar dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi pelajar atau mahasiswa yang tertarik mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah Kota Tasikmalaya periode 2009-2018.

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari berbagai akses dari website maupun situs web lainnya. Dengan demikian penulis tidak melakukan penelitian secara primer yang membutuhkan lokasi untuk penelitian.